

**STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Wahdini Norrie Afini Harahap
NPP. 29.0173

Asdaf Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia

Email: afiniharahap180400@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the Education Office's performance in improving the competence of elementary school teachers has not gone well. The Education Office has not fulfilled the five dimensions contained in the theory of organizational performance, namely productivity, responsiveness, responsibility, accountability and service quality. There are still shortcomings in terms of human resources and in terms of budget.. **Purpose:** The author focuses on the problem of employee interest that is still lacking in participating in competency development activities, and not taking advantage of opportunities to develop their competencies.. **Method:** This study uses mixed methods and analysis of the participation stage according to Yadvav's Theory. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (6 informants), and documentation. **Result:** there are several research findings such as programs that have not reached the target, lack of responsiveness of the service to the demands of teacher needs, incompatibility of the realization of budget use with predetermined plans, there is still a lot of data that has not been published on the website of the Education Office, and there are gaps in services and the number of infrastructure facilities. The damaged one.. **Conclusion:** The performance of the Education Office in improving the competence of elementary school teachers in South Labuhan Batu Regency is measured based on the theory of empowerment. There are several inhibiting factors such as the lack of socialization of the education office in improving the competence of elementary school teachers, the enthusiasm of elementary school teachers, and the existence of several obstacles from teachers and from schools. Efforts made by the Department of Education in overcoming these obstacles are implementing the organizing stage, the interpretation stage and the policy implementation stage.

Keywords: Performance, Competence, Teacher

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): kesadaran dan pemahaman masyarakat Penelitian yang berjudul Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan *E- Government*. Terdapat kekurangan-kekurangan dari segi sumber daya manusia maupun dari segi anggaran. **Tujuan:** untuk mendiskripsikan strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan *E- Government*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis terhadap tahap partisipasi menurut Teori Yadav. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan *E-Government* di Labuhanbatu Selatan kondisi internal memiliki kekuatan dalam hal sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sedangkan kelemahannya sedikitnya sumber daya manusia khususnya ahli IT. **Kesimpulan:** Kondisi eksternal menunjukkan bahwa peluang yang ada yaitu sudah memiliki regulasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pengembangan *E-Government* terkait teknologi dalam penyelenggaraan *E- Government* dan jarak permukiman masyarakat yang jauh dari kota sehingga tidak bisa mengakses internet. Rekomendasi dari penelitian ini tingkatkan sosialisasi produk dari *E-Government* kepada OPD dan masyarakat secara maksimal.

Kata kunci: Strategi, *E-Government*, Sumber Daya Aparatur



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan bahwasanya salah satu tujuan Negara Indonesia ialah menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Globalisasi yang sedang berlangsung di dunia saat ini menuntut terwujudnya keadaan yang efisien dan efektif. Reformasi Birokrasi yang dilatar belakangi adanya ketentuan berdirinya system pemerintahan yang tulus, terbuka serta dapat menanggapi ketentuan perubahan dengan seefektif mungkin, menciptakan daya cipta pengadaan data informasi serta media komunikasi yang terbuka dari *E-Government*.

Pelaksanaan *E-Government* di Indonesia sekarang tetap mengalami kesenjangan dikarenakan belum terpadu dan efisiennya tata laksana serta management system pemerintah berlandas nasional. Pemerintah Republik Indonesia menyadari akan pentingnya Penyelenggaraan *E-Government* untuk mendukung pembangunan di segala sektor. Domain yang menjadi perhatian akan kurangnya penerapan SPBE adalah domain tata kelola, kebijakan layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan. Sedangkan untuk survei SPBE pada tahun 2019-2020 belum dapat terlaksana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dampak atas terjadinya pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia.

Dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 67 Tahun 2018 disebutkan bahwa guna memberi dukungan pada pelaksanaan pengembangan serta penerapan manfaat teknologi maupun komunikasi yang berintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan data dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 – 2021, penyelenggaraan *E- Government* secara substantif tetap terdapat berbagai hal yang harus dikembangkan khususnya mencakup sumberdaya manusia, infrastruktur, konten, dan aplikasi (Renstra Diskominfo Labusel 2016-2021). sumberdaya manusia masih terbatas. Dari keterbatasan total ahli IT ini dapat berpengaruh terhadap pengumpulan pekerjaan serta perihal penyelenggaraan *E-Government* yang wajib terselesaikan dengan ketepatan waktunya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara via pesan

singkat dengan staf ahli IT Bapak Yudhi Andrian,S.Si yang mengatakan bahwa beberapa aplikasi khusus masih tertunda dan masih terus dalam proses pembangunan seperti aplikasi e- kinerja yang sedang dalam proses pembangunan dan sudah memakan waktu sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dikarenakan tim ahli IT yang terbatas.

Kemudian permasalahan eksternal yang menjadi hambatan penyelenggaraan *E-Government* adalah tetap adanya sejumlah wilayah yang tidak teraih fasilitas komunikasi, kesenjangan informatika di masyarakat, pertumbuhan teknologi informatika dan komunikasi yang pesat, adanya infrastruktur teknologi informatika yang tidak menyeluruh, adanya keterbatasan paham aparaturnya maupun warga pada TIK (Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018-2023). Penyebab dari beberapa permasalahan yang terjadi sebagaimana disampaikan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Bapak Muhammad Irsan Harahap, S.STP via pesan singkat adalah dikarenakan keterbatasan anggaran dan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelesaikan masalah itu untuk tercapainya penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*.

Apabila didasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk menjalankan penelitian dengan topik “STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Keterbatasan anggaran dan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan *e-government* di lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten labuhanbatu selatan dalam menyelesaikan masalah itu untuk tercapainya penyelenggaraan dan pengembangan *e-government*.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Additya Wijaya, Tesis pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan *E-Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*”. dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian Hasilnya yaitu penyelenggaraan *E-Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang masih tidak berlangsung secara optimal. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penyelenggaraan *E-Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang pertama kurangnya keinginan pemerintah (*goodwill*) dan perhatian pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan *E-government* yang kedua terbatasnya sumber daya baik dari sumber daya finansial, infrastruktur teknologi maupun manusianya yang mampu mengelola *E-Government*. Dan yang terakhir adalah terbatasnya kemampuan akan pengetahuan teknologi dan informasi sehingga tidak bisa memanfaatkan fasilitas *E-Government* yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kedua, Yulinar Ayu dan Dra. Measaroh, M.Si., *Journal Of Publicity And Management Review*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengembangan *E-Government* di Kabupaten Kendal”, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Kendal berlangsung secara baik dibuktikan dengan teridentifikasinya berbagai faktor berhasilnya pengembangan *E-Government* yang memuat *support, capacity, value*.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

2. Untuk melihat kondisi lingkungan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika pada penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk melihat strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika pada mengatasi hambatan penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sugiyono, 2020. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Simangunsong, 2017.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Lingkungan Internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam operasionalisasi konsep penelitian peneliti menggunakan teori manajemen strategi dari Wheelen dan Hunger (2012) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Pengamatan Lingkungan, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan Kontrol.

Infrastuktur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tergolong memadai untuk melakukan penyelenggaraan *E-Government* dengan baik. Setiap bulannya juga dilakukan perawatan berupa pengecekan dan perbaikan alat kantor demi menunjang penyelenggaraan *E-Government* dengan baik. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Atau Sumber Daya Aparatur Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Karena Anggaran Untuk Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dan Pelatihan Terkait Informasi Dan Teknologi Dalam Menunjang Penyelenggaraan *E-Government* Dengan Optimal. Terlebih Lagi Adanya Pandemi

Covid-19 Anggaran Di *Recofusing* Untuk Penanganan Pandemi Tersebut. Selain Itu Kurangnya Tenaga Ahli IT Mengakibatkan Beberapa Program Dan Aplikasi Yang Dibuat Terhambat. Kemudian Dari Segi Kebijakan Tata Kelola Masih Dalam Tahap Konsep. Kemudian Aspek Kebijakan Layanan Masih Cukup Lemah Karena Indikator Kebijakan Layanan Masih Dalam Tahap Konsep, Yakni SIMPEG, *E- Planning*, *E-Budgeting*, *E-Kinerja*, LPSE, E-LAPOR, JDIH, Serta Layanan Publik.

3.2 Kondisi Lingkungan Eksternal Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Penyelenggaraan *E-Government* Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sudah terdapat regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan *E-Government* yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018. Sebuah situs melalui <http://smartregency.labuhanbatuselatankab.go.id/> menjadi bukti penyelenggaraan yang telah dilakukan dan masih terus berproses menjadi lebih baik. Hal ini tentu menjadi peluang yang bagus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal yang menjadi ancaman dalam usaha untuk meningkatkan penyelenggaraan *e-government* di kabupaten labuhanbatu selatan adalah masyarakat yang acuh terhadap perkembangan teknologi di lingkungan kabupaten labuhanbatu selatan masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dikarenakan jarak yang sangat jauh.

3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menyusun suatu strategi untuk membuat ASN yang ada di Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan tergerak untuk melaksanakan bimtek yang difasilitasi oleh Diskominfo Labusel dan bekerja sama dengan pihak luar seperti misalnya universitas Telkom agar memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem informasi dan teknologi dalam rangka menyelenggarakan *E-Government* mewujudkan terlaksananya *good governance*. Hal ini tentunya akan meningkatkan nilai hasil evaluasi SPBE dalam domain manajemen SPBE di indicator tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia

dengan bobot nilai 16,50% Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan dan mengawasi ASN dalam penyelenggaraan *E-Government* ini. Kebijakan ini bertujuan untuk merealisasikan strategi yang telah disusun Dinas Komunikasi dan Informatika . Dalam implementasi strategi terdapat 4 domain yang menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun suatu strategi yaitu mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi dengan OPD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan *E-Government* dengan membuat suatu kebijakan dengan merancang suatu program kegiatan. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai berikut:

Program yang dirancang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini dilakukan secara *continue* bersama dengan bagian kepegawaian dari OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian di bidang Teknologi dan Informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pelatihan yang dilakukan secara luring di *command center* Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Protokol Kesehatan. Hasil yang diharapkan dari program ini meningkatnya disiplin dan kapasitas sdm aparatur, serta jumlah penyusunan Laporan OPD (Realisasi RENJA, PROGNOSIS, SMESTERAN). Anggaran yang diperlukan dalam program penyelenggaraan *E-Government* ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya program ini memakan biaya yang besar, tetapi memiliki sasaran yang jelas yang salah satunya terlaksananya peningkatan, pemahaman dan keterampilan TIK bagi aparatur dan terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik. Prosedur dalam pelaksanaan program penyelenggaraan *E-Government* ini adalah pertama pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah Menyusun dokumen perencanaan dalam 4 tahun yang disebut dengan *Masterplan* dan Renstra Diskominfo 2018 s/d 2023 kemudian akan diwujudkan melalui 4 tahapan yang disesuaikan dengan panduan penyusunan rencana induk pengembangan *E-Government* lembaga versi I.0 (Kepmen Kominfo Nomor 57 Tahun 2003) Terakhir, hasil dari penyelenggaraan *E-Government* akan dilaporkan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi hambatan yang ada adalah dengan terus mengembangkan program-program yang telah disepakati melalui Rancangan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Beberapa program tersebut terdiri dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, kerja sama informasi dengan media massa, pengembangan kerja sama teknologi, informasi dan komunikasi dan media massa. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika terus menginformasikan kepada ASN baik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika maupun yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika diadakan pendidikan dan pelatihan ataupun seminar/workshop/sejenisnya yang dilakukan secara daring yang dapat diikuti. Hal ini untuk meningkatkan nilai indeks penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya pada aspek Tata Kelola teknologi informasi dan komunikasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan adanya relevansi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Additya Wijaya, Tesis pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan *E-Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*”. Bahwa benar adanya bahwasannya keterbatasan anggaran dan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelesaikan masalah itu untuk tercapainya penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*.

Selain itu hasil penulis setuju dengan penelitian oleh Yulinar Ayu dan Dra. Measaroh (2018) dengan judul “Analisis Pengembangan *E-Government* di Kabupaten Kendal”, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Kendal berlangsung secara baik dibuktikan dengan teridentifikasinya berbagai faktor berhasilnya pengembangan *E-Government* yang memuat *support, capacity, value*.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa Anggaran yang diperlukan dalam program penyelenggaraan *E-Government* ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya program ini memakan biaya yang besar, tetapi memiliki sasaran yang jelas yang salah satunya terlaksananya peningkatan, pemahaman dan keterampilan TIK bagi aparatur dan terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak menyinggung anggaran dalam peningkatan perwujudan *e-government*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas mengenai strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Melihat kondisi lingkungan Internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kekuatan yaitu infrastruktur sudah memadai hal tersebut terbukti dengan adanya jaringan WAN yang menggunakan radio link untuk menunjang penyelenggaraan *E-Government*.
2. Kondisi Eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :
 - Adanya peluang. Peluang adalah kondisi dari luar lingkungan yang mendorong terlaksananya *E-Government*.
 - Ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masyarakat yang acuh terhadap perkembangan Teknologi di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dikarenakan jarak yang sangat jauh.

Melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal terutama untuk mengatasi kelemahan dan menjawab ancaman, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Strategi untuk mengatasi hambatan internal yaitu dengan memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya aparatur serta ahli IT dengan pihak luar secara *online/workshop/seminar* di ruangan *command center* Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada saat masa pandemic Covid-19.
- Strategi untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu melakukan konsolidasi organisasi dengan OPD di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal memberikan masukan, mengevaluasi data dan meminta penjelasan atas data yang dikumpulkan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhan batu Selatan Sumatera Utara serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Pramusinto., dan W. Kumorotomo. 2009. *Governance Reform* di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, MAP-UGM. Yogyakarta: Gava Media

- Akbar,P.S., dan Usman,H. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Cahyadi, A. 2003. E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. 4 (1): 1-12.
- David, F. R. 2017. Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Deddy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fahmi, I. 2016. Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, M. 2019. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrajit. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- J., L. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Maryani., dan Djaenuri. 2012. Manajemen Pemasaran Politik. Bandung: cv.Esvira Mandiri
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. SOLO: Alfabeta. Rangkuti, F. 2017. Analisis SWOT : *Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rianto, Budi. 2012. Polri dan Aplikasi *E-Government* dalam Pelayanan Publik. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Setiani, Y. A., & Maesaroh, M.2018. Analisis Pengembangan E- Government Di Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy*